

SEKULERISASI DAN NEOLIBERALISME MELALUI HARMONISASI STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL : IFRS

Wiwit Apit Sulistyowati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Pancasakti Tegal

Email :wiwit_apit@hotmail.com

ABSTRACT

Globalization such as other trade activities between countries and the emergence of multinational companies, resulting in the need for an accounting standard is widely accepted around the world. Comparable accounting standards is required by multinational companies, and also by the users of financial statements to evaluate the performance of companies on a global scale and to help making decisions relating to the securities. IFRS serve as the main reference the financial accounting standards development in Indonesia because IFRS is a very robust standard. Preparation is supported by the international advisory board of experts and from around the world. With already declared on IFRS convergence program, then in 2012 all the standards issued by the Financial Accounting Standards Board IAI will refer to IFRS and applied by the entities. Adoption of accounting and the current educational system has been separated from the reality of Indonesian society, because education systems and accounting concepts taken directly from the West without the codification and significant adjustments. Accounting and accounting education system is basically bringing values "secularization" which has the main feature of self-interest, emphasizing the bottom line profits, only recognizes the reality of quantitative, materialistic and mechanical. Harmonization of accounting as part of neoliberalism is the implementation of power to perpetuate the hegemony of corporate interests through the manufactured consent for the benefit of MNC's in the United States.

Keywords : secularization, neoliberalism, harmonization and IFRS

PENDAHULUAN

Perbedaan lingkungan dan kondisi hukum, sosial politik dan ekonomi antar negara menyebabkan standar akuntansi yang berlaku juga berbeda-beda. Hal ini berkaitan dengan globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional yang mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia.

Globalisasi membawa implikasi bahwa hal-hal yang dahulunya merupakan kewenangan dan tanggungjawab tiap negara, akan dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian pula dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi suatu negara (Arja Sadjarto, 1999). Standar akuntansi memberikan gambaran yang jelas dan konsisten kepada pemegang saham, membuat laporan perusahaan lebih dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan. Standar akuntansi yang dapat diperbandingkan sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, dan juga oleh para pengguna laporan keuangan yang ingin mengevaluasi kinerja perusahaan skala global dan untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan sekuritas.

Dalam penerapan standar akuntansi internasional terdapat dua pendapat, yaitu harmonisasi dan standardisasi. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (*International Accounting Standards Committee*). Indonesia bahkan terang-terangan menyadur *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* IASC dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Perkembangan terbaru, saat ini telah disosialisasikan sistem pendidikan akuntansi yang merujuk internasionalisasi dan harmonisasi standar akuntansi melalui penerapan IFRS (*International Financial Reporting Standards*) di Indonesia tahun 2012. Menurut IAI, IFRS dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Penyusunannya didukung oleh para ahli dan dewan konsultasi internasional dari seluruh penjuru dunia. Dengan telah dideklarasikan program konvergensi terhadap IFRS ini, maka pada 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas.

Pengadopsian akuntansi dan sistem pendidikan saat ini telah terlepas dari realitas masyarakat Indonesia, karena sistem dan konsep pendidikan akuntansi dibawa langsung dari Barat tanpa kodifikasi dan penyesuaian yang signifikan. Akuntansi dan sistem pendidikan akuntansi pada dasarnya membawa *values* “sekularisasi” yang memiliki ciri utama *self-interest*, menekankan *bottom line* laba, hanya mengakui realitas kuantitatif, materialistis dan mekanistik (Mulawarman, 2008). Konsekuensi nilai sekuler tersebut berdampak pada desain akuntansi sebagai ”perangkap hegemoni korporasi” (Mayper *et.al.* 2005) serta diarahkan untuk “mengisi” peserta didik dalam memahami kepentingan ekonomi (Amernic dan Craig 2004) dan mereduksi nilai di luar ekonomi. Kondisi yang berlangsung lama ini kemudian menjadi “dogma” akuntansi yang “universal” dan terstruktur dalam ekonomi positivistik (Truan dan Hughes 2003). Perangkap hegemoni korporasi lewat akuntansi kemudian mengarah pada evolusi lebih lanjut sebagai “alat” neoliberalisme ekonomi, (lihat misalnya Kim 2004; Abeysekera 2005; Lehman 2005).

SEKULERISASI AKUNTANSI

Menurut Al-Attas (1993), sekularisasi merupakan hilangnya dunia dari pemahaman religi dan kuasi religi itu sendiri, hilangnya semua yang berkenaan pandangan dunia yang khas, menghancurkan semua simbol-simbol mitos supernatural dan suci. Penghancuran nilai-nilai tersebut berlaku di seluruh kehidupan sosial, politik maupun budaya, serta seluruh aspek kehidupan kemanusiaan. Sekularisme menurut Al-Attas (1981) memiliki tiga komponen integral, yaitu *the disenchantment of nature* (penegasian terhadap kekuatan di luar manusia), *the desacralization of politics* (penegasian atas kekuasaan terpusat), dan *the deconsecration of values* (penegasian nilai-nilai non materi atau *materialism* dan penolakan terhadap *certainty condition* atau *relativism*). Tiga bentuk sekularisasi Al-Attas tersebut memiliki kesesuaian dengan bangunan teori dan realitas akuntansi.

Sekularisasi bangunan teori dan realitas akuntansi dijelaskan sebagai berikut : pertama, *the disenchantment of nature* ditunjukkan pada substansi *self interest* para akuntan, *standard setter*, *shareholders*, birokrat dan politisi sebagai individu-individu yang terlibat melakukan upaya memaksimalkan *expected utilities* mereka sendiri. Wujud utama dari *disenchantment of nature* dalam akuntansi adalah penerapan konsep dasar teoritis akuntansi, yaitu *Entity Theory*. *Entity Theory* seperti kita tahu merupakan dasar dari seluruh kerangka konseptual akuntansi dijalankan yang kemudian mendesain seluruh logika akuntansi yang berpusat

pada *stockholders*. Kedua, *the desacralization of politics* ditunjukkan pada pemisahan kekuasaan *standard setter* dari lingkaran kepentingan birokrasi dan politisi maupun pemisahan kekuasaan antara *principal* dan *agent*. Pemisahan kekuasaan ini menurut Fukuyama (2003) sebagai bentuk dasar kapitalisme yang merepresentasikan “tuan” dan “budak”. Representasi dari pemisahan kekuasaan ini nampak pada kuatnya kedudukan organisasi para akuntan, seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Ketiga, *the deconsecration of values* tampak pada ditolaknya nilai-nilai normatif sebagai *main guidance*. *Main guidance* sebenarnya adalah kepastian aturan, kepastian pengukuran dan kepastian pengakuan secara materi. Tiga kepastian tersebut untuk mengendalikan pergerakan menuju perubahan-perubahan sesuai realitas dan keinginan *self-interest* di area *market* dan *politic*.

NEOLIBERALISME AKUNTANSI MELALUI HARMONISASI AKUNTANSI

Harmonisasi akuntansi sebagai bagian dari neoliberalisme merupakan implementasi kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan hegemoni korporasi melalui *manufactured consent* untuk kepentingan MNC’s di Amerika Serikat (Merino *et al.* 2005). *Manufactured consent* adalah cara paling efektif mengarahkan kekuasaan dan justifikasi ideologis melalui deregulasi untuk mendistribusikan *wealth*, *security*, secara global, pada kondisi penguatan pasar yang bebas dari intervensi regulasi. Teknisnya, MNC’s mendesain deregulasi lewat harmonisasi akuntansi, sedangkan akuntan dan analisis finansial dijadikan sebagai “*professional gatekeeper*” untuk injeksi kepentingan MNC’s lewat lobi politik dan kelonggaran deregulasi audit demi profit. Langkah berikutnya, “hegemoni” dan pengendalian para MNC’s di Amerika Serikat dalam pengembangan standar akuntansi internasional lewat IASB (*International Accounting Standard Boards*). Dampaknya, IAS (*International Accounting Standards*) tidak dapat diadopsi tanpa persetujuan lembaga standar akuntansi Amerika Serikat (*Financial Accounting Standard Boards*) (Diaconu 2007).

Perilaku MNC’s lewat praktik harmonisasi akuntansi tersebut mirip bentuk kolonialisme (Choi dan Muller 1998, 48). “Kolonialisme” akuntansi melalui harmonisasi di Indonesia dimulai pada saat Indonesia mengalami krisis keuangan tahun 1997. IMF (*International Monetary Fund*) mengajukan beberapa syarat atas *lending conditionalities* dari *Memorandum of Economic and Financial Policies* apabila menginginkan perubahan makro ekonomi Indonesia, salah satunya adalah praktik akuntansi Indonesia harus mengadopsi kebijakan keuangan Neoliberal IASB (Graham dan Neu 2003). Hal ini

merupakan awal dari “tekanan dan kewajiban” yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan IFRS secara menyeluruh di Indonesia.

A. IFRS: Flows of Things Kapitalisme

Dasar dari penerapan IFRS sebenarnya adalah masuknya siapapun yang mengadopsi IFRS dalam globalisasi liberalisasi *financial market* dan harmonisasi standar akuntansi dalam mendorong tersebarnya pada praktik secara umum. Merujuk pemikiran Burchell et al. (1980) seperti diungkapkan kembali oleh Graham dan Neu (2003) bahwa akuntansi termasuk di dalamnya IFRS sebagai implementasi riilnya digunakan atau untuk melayani dua kepentingan, kompleksitas internal organisasi dan praktik sosial lebih luas. Mekanisme seperti itu berdampak pada penyebaran perubahan akuntansi, berupa teknologi akuntansi, hubungannya dengan kepentingan organisasi menjadi organisasi supranasional atau transnasional (MNC’s). Penyesuaian teknologi akuntansi dalam praktik organisasi supranasional melayani tujuan yang sama dengan organisasi konvensional, tetapi berbeda mekanismenya yaitu melakukan aktivitas yang dinamakan “aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu” (*cross-border flows beyond time and space*), seperti aliran modal, produk, informasi, kebijakan dan orang.

Akuntansi untuk aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu menciptakan bentuk sesuai perbedaan sosial yang melampaui simbol dan mitos. Perbedaan sosial berkaitan dengan asimetri kekayaan (*wealth*) dan kekuasaan (*power*) yang eksis di berbagai wilayah secara internasional. Hasil teknologi akuntansinya dalam organisasi supranasional membantu menciptakan dan menyeimbangkan kondisi ketidakstabilan antara pusat dan pinggiran, antara *non-majority world* dan *majority world*. Graham dan Neu (2003) melihat bahwa teknologi dan praktik akuntansi yang dijalankan MNC’s ternyata bukan hanya melakukan tata kelola aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu saja, tetapi mereka menyodorkan “praktik standarisasi” lintas batas. Lebih jauh, desakan standarisasi ternyata bermuatan ekonomi politik untuk kepentingan MNC’s mempergunakan berbagai institusinya.

Tabel *Flows of ‘Things’*

Flows of Things	Organizational Involved	Examples
Capital	International Financial Markets	Currency and Security Trading
	IASB	Harmonization of Accounting Standards IFRS
	IMF	Currency and Market Liberalization
Products	WTO	Myriad Goods and Services
Information	OECD	Performance Indicators
	W3C, NSF	Internet Standards
Policies	IMF, World Bank	Lending Conditionalities
People	National Governments	Immigration Policies
	OECD	Labour Migration

Sumber: Graham dan Neu (2003) dimodifikasi

Salah satu kepentingan IFRS dapat dilihat dari dampaknya setelah diterapkan adalah untuk kepentingan kepastian aliran atau arus kas perusahaan “bermain monopoli” di berbagai *flows of things*. Ujung-ujungnya adalah dijalkannya “permainan monopoli” dengan laporan arus kas sebagai alat bantu pemetaan kekuatan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi “dadu mesin” dari bursa saham yang disebut *Electronically Operated Global Casino* (Casino Global Elektronik), atau dalam bahasa Castells disebut sebagai *Automaton* (Capra 2003, 120). *Automaton* menurut Castells adalah ciptaan inti ekonomi hasil proses globalisasi keuangan yang secara tegas mengatur kehidupan manusia. Bukan robot-robot yang menghilangkan lapangan kerja atau komputer-komputer pemerintah, tetapi mesin-mesin globalisasi berbentuk transaksi keuangan elektroniklah yang mengambil alih dunia manusia. Logika automaton bukanlah aturan-aturan pasar tradisional, dinamika aliran keuangan yang digerakkannya saat ini di luar kendali-kendali pemerintahan negara, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan. Akan tetapi pada keluwesan dan ketepatan teknologi informasi dan komunikasi baru, regulasi ekonomi global yang efektif secara teknis menjadi masuk akal.

B. Dampak-dampak Neoliberalisme Akuntansi

Ekonomi kapitalisme sebagai akar dari neoliberalisme telah menunjukkan “kinerja krisis”-nya yang tak dapat dipungkiri. Krisis tahun 2007-2008 dan bahkan diprediksikan akan memuncak tahun 2009 yang lalu dapat disebut sebagai bentuk siklik dan cenderung mengarah pada akumulasi keruntuhan ekonomi kapitalisme. Siklik dan kecenderungan akumulasi ini terlihat sejak tahun 1923, kemudian

berulang pada tahun 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998-2001. Krisis keuangan tahun 2000-2001 di Amerika Serikat puncaknya ketika terjadi skandal korporasi terburuk 70 tahun terakhir seperti Enron, Arthur Anderson, WorldCom, Cisco Systems, Lucent Tech dan lainnya (lihat misalnya Stiglitz 2006, 7-8; Ravenscroft dan William 2004; Mayper *et.al.* 2005; Bean dan Bernardi 2005).

Krisis memicu reformasi pendidikan akuntansi beretika. Mulai dari *The Sarbanes Oxley Act* (SOA) dan SAS 99 yang juga telah dilakukan sebelumnya dalam *The Bedford Report* tahun 1986 (Truan dan Hughes 1999). Kesadaran etis juga dideteksi *The Wall Street Journal* dengan peningkatan mata kuliah *Accounting Fraud* di berbagai perguruan tinggi Amerika Serikat (Haas 2005). Tetapi kita ketahui ternyata SOA maupun SAS 99 tidaklah memberikan dampak positif terhadap akuntansi dan *finance*. *The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO) yang dibentuk tahun 1985 oleh lima lembaga profesi untuk mendesain dan membentengi masalah kecurangan pelaporan keuangan dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan *corporate governance*, praktik etis, dan pengendalian intern, ternyata tidak sesuai dengan harapan.

Kejahatan korporasi dan akuntansi menjadi sumber krisis global karena permainan derivatif di pasar saham berkenaan kredit perumahan atau *subprime mortgage*. Kita lihat kejatuhan perusahaan investasi sekuritas keempat terbesar di Amerika, Lehman Brothers. Kebangkrutan Lehman Brother disebabkan ketidakmampuan melunasi kewajiban miliaran dollar AS. Kehancuran pasar saham lewat derivatif juga terungkap lagi dengan kasus penipuan senilai 50 miliar dollar AS di Wall Street oleh Bernard Madoff di akhir tahun 2008. Masalah besarnya dari sisi akuntansi adalah perusahaan Madoff ditangani oleh kantor akuntan kecil, Friebling & Horowitz. Indonesiapun tidak ketinggalan, misalnya Sarijaya Sekuritas yang melakukan penggelapan dana dan salah urus aktivitas sekuritas senilai 245 miliar rupiah. Belum lagi kasus Group Bakri atau yang sekarang sedang marak per Januari 2009, 12 perusahaan sekuritas lainnya diberi sanksi denda dan dalam pengawasan Bappepam karena melakukan *short selling*. Aktivitas mereka ditengarai yang telah menyebabkan gejolak IHSG BEI.

C. Adopsi dan Harmonisasi AIS/IFRS di Indonesia

Melakukan adopsi, harmonisasi, bahkan *convergence* (tidak harus serupa penuh tetapi kualitasnya di atas harmonisasi) ke IFRS merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari bagi negara-negara di dunia, serta menjadi perhatian pula bagi

lembaga-lembaga di dunia seperti Bank Dunia, WTO dan lembaga lainnya. Termasuk Indonesia yang merupakan *full member* dari IFAC dan juga anggota dari WTO. Tanggapan Indonesia terhadap IFRS di bidang standar profesi, IAI mendukung harmonisasi standar akuntansi melalui adopsi dan adaptasi AIS (Soedarjono, 1998).

Pelaksanaan adopsi ke IFRS bagi tiap negara di dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, pelaksanaan adopsi dapat melalui beberapa tingkatan. Tingkat/tahapan adopsi IFRS dapat dilakukan melalui lima tahap yaitu (Media Akuntansi, 2005e), yaitu: 1) *full adoption*, yaitu mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkannya kata demi kata, 2) *adapted*, yaitu mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi di suatu negara, 3) *piecemeal*, yaitu mengadopsi sebagian nomor IFRS, nomor-nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja, 4) *referenced*, yaitu sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar, 5) *not adoption at all*, berarti suatu negara tidak mengadopsi IFRS sama sekali. Pada 8 Januari 2004 badan penyusun standar akuntansi di Indonesia yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) memutuskan membentuk dua tim untuk mengantisipasi penerapan secara penuh IFRS. Dua tim tersebut adalah Satuan Tugas untuk *Full Adoption* dan Satuan Tugas untuk Reformat PSAK. Satuan Tugas untuk *Full Adoption* melakukan penelitian atas seluruh Standar Laporan Keuangan Internasional (IFRS) guna tercapainya konvergensi, melakukan penelitian apakah seluruh paragraf aturan standard dalam IFRS harus diadopsi secara penuh mengingat adanya perbedaan lingkungan bisnis, sehingga belum tentu standar tersebut harmonis dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia, dan mencari masukan dari negara-negara anggota IFAC lainnya tentang sejauh mana pengadopsiannya terhadap IFRS. Satuan Tugas untuk Reformat PSAK melakukan tugas untuk penyempurnaan penyusunan PSAK serta penataan ulang terhadap penerbitan produk-produk PSAK pada waktu mendatang (Media Akuntansi, 2005f).

Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengacu pada IFRS yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, sedangkan pada format akan berubah tetapi tidak sampai mengubah substansi standar akuntansi keuangan. Adanya harmonisasi bahkan konvergensi terhadap IFRS diharapkan informasi akuntansi memiliki kualitas utama, yaitu komparabilitas (dapat diperbandingkan) dan relevansi. Kualitas tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan antara negara dan untuk pengambilan keputusan.

D. Kesimpulan

Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia

Pembentukan IASC merupakan salah satu usaha harmonisasi standar akuntansi yaitu untuk membuat perbedaan-perbedaan antar standar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil. Harmonisasi ini tidak harus menghilangkan standar akuntansi yang berlaku di setiap negara dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa standar akuntansi internasional yang disusun oleh IASC diadopsi menjadi standar akuntansi nasional suatu negara. FASB mempunyai pandangan bahwa tetap harus ada satu standar

akuntansi internasional yang berlaku di seluruh dunia. Untuk itu perlu dibentuk organisasi penentu standar akuntansi internasional dengan struktur dan proses tertentu. Menurut FASB, IASC bisa dimodifikasi menjadi organisasi ini atau membentuk organisasi baru atau memodifikasi FASB sendiri.

Adanya IFRS banyak mendapat penolakan yang disebabkan karena latar belakang nasional, keunikan iklim bisnis tiap negara, dan perbedaan kebutuhan dari pemakai laporan keuangan. Meskipun banyak penolakan tetapi banyak pula tekanan untuk mengadopsi IFRS, dengan demikian perlu ada yang menjembatani agar Standar Akuntansi Keuangan sejalan dengan IFRS yaitu dengan melakukan harmonisasi bahkan konvergensi terhadap IFRS. Adanya harmonisasi bahkan konvergensi terhadap IFRS maka diharapkan informasi akuntansi memiliki kualitas utama yaitu komparabilitas dan relevansi. Kualitas tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan perbandingan laporan keuangan antara negara dan untuk pengambilan keputusan.

Referensi

- Arja Sadjiarto. 1999. *Akuntansi Internasional: Standarisasi Versus Harmonisasi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1 (2): 144-161.
- Choi, Frederick D.S., Carol Ann Frost, Garry K Meek. 1999. *International Accounting*. 3th edition. United States: Prentice Hall International.
- Menuju Penerapan IFRS, antara Harmonisasi dan Konspirasi Zoel Dirga Dinhi <http://www.ima-unhas.com>
- Collett , Petter H, Jayne M. Godfrey, Sue L. Hrasky, 1999. *International Harmonization: Cautions From The Australian Experience*. www.google.com, diakses 5 Januari 2004
- Fearnley. S dan Tony Hines. 2002. The Adoption of International Accounting Standards in the UK: Review of Attitudes. www.ssrn.com, diakses 5 Januari 2004 Media Akuntansi, 2005a *Jalan*